



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DI YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUGENG ARIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **186688**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 890.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m<sup>2</sup>/55 m<sup>2</sup> di KOTA JAMBI ,  
HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah Seluas 306 m<sup>2</sup> di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp.  
120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di SLEMAN, HASIL  
SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 86.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI  
Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 31.300.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 173.482.360

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 1.180.782.360

**III. HUTANG**

Rp. 130.505.610

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.050.276.750

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HERUM FAJAR WATI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 97596

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/250 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 3500 m2 di LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 988 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/104 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. ----

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 76.200.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 42.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.328.200.000

**III. HUTANG**

Rp. 100.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.228.200.000

Catatan:



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : M. AULIA RAHMAN  
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)  
3. NHK : 520992

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	180.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	180.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	28.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	16.100.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	224.100.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	50.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	174.100.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IMAN TEGUH RAHARTO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 628576

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.099.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup> di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m<sup>2</sup>/32 m<sup>2</sup> di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m<sup>2</sup>/32 m<sup>2</sup> di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m<sup>2</sup>/63 m<sup>2</sup> di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 104 m<sup>2</sup> di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 350 m<sup>2</sup> di TEGAL, WARISAN Rp. 105.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 100 m<sup>2</sup> di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
9. Tanah Seluas 112 m<sup>2</sup> di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m<sup>2</sup>/80 m<sup>2</sup> di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 45.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU KARIMUN WAGON CITY CAR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	149.958.136
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.298.458.136
III. HUTANG	Rp.	57.795.819
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.240.662.317

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NOVA MULYATI
2. Jabatan : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
3. NHK : 803640

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.331.000.000

1. Tanah Seluas 334 m2 di KOTA PADANG PANJANG , HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/54 m2 di SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/225 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 886.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 101.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SPM/SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, GRAND LIVINA MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 10.950.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 37.946.129

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.481.396.129

**III. HUTANG** Rp. 166.650.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.314.746.129

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SHINTA SWARLIKA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 803851

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>300.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>17.000.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA NMAX MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>11.856.899</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>18.779.555</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>347.636.454</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>82.434.782</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>265.201.672</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.